

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan berusaha menjelaskan hasil dari temuan peneliti dengan beberapa data yang berhasil dikumpulkan baik dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Peneliti akan mendeskripsikan data-data hasil temuan tersebut dan diperkuat dengan teori-teori yang ada. Deskripsi tersebut diharapkan dapat menjelaskan tentang keadaan objek penelitian dan kemudian menjadi jawaban atas fokus masalah penelitian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung selama masa pandemi Covid-19. Data-data yang diperoleh akan dibahas dan dijelaskan dalam bab ini dengan harapan dapat mempermudah dalam menentukan jawaban dari fokus penelitian.

1. Potret Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung

Sebagian orang tentu memiliki pandangan tersendiri mengenai aktifitas yang dijalankannya. Misalnya pandangan dan aktifitas dalam keseharian tak lepas dari berbagai layanan maupun dari berbagai barang hasil kreasi dari para pelaku UMKM. Dapat dilihat ketika pagi hari kita ingin mencari makanan tak lain juga kita membeli makanan di salah satu penjual makanan yang sekaligus juga menjadi pelaku UMKM.

Di Kabupaten Tulungagung sendiri banyak masyarakat ataupun perorangan yang mendirikan UMKM dan tidak hanya terfokus pada satu jenis produk makanan saja melainkan ada beberapa jenis produk diantaranya, kerajinan tangan (*handcraft*), cinderamata, batik, marmer dan juga masih

banyak yang lainnya. Dari sini dapat dijelaskan bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung sangat beraneka ragam.

Dari hasil pemaparan diatas sesuai dengan pengertian usaha mikro yang di ungkapkan oleh Tulus T.H. Tambunan dalam bukunya yang berjudul *UMKM di Indomesia*, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 dari UU tersebut menerangkan bahwa Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik perorangan maupun individu atau milik badan usaha yang memiliki ciri-ciri sebagai pendiri usaha mikro yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam UU tersebut.¹⁰⁷ Usaha kecil merupakan sebuah usaha ekonomi yang berjalan secara produktif serta yang berdiri sendiri, yang sudah dilakukan dan didirikan oleh perorangan individu maupun badan usaha.

Menurut analisa dari peneliti, sesuai data yang ditemukan Umkm yang ada di Kabupaten Tulungagung rata-rata memperoleh omset senilai Rp. 50.000.000 sampai Rp. 200.000.00 pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan kriteria usaha mikro menurut Tulus T.H. Tambunan dalam bukunya yang berjudul *UMKM di Indomesia* adalah sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi ciri-ciri:
 - a. Memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat produksi usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

¹⁰⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indomesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai oleh bank, dan yang telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat produksi usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan juga yang dilakukan oleh perorangan atau juga badan usaha yang bukan merupakan anak cabang perusahaan tersebut dan juga tidak dimiliki dan dikuasai oleh bank serta yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan juga paling banyak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Ini juga tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha produksi.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).¹⁰⁸

¹⁰⁸ *ibid* hlm 12

Selain itu untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami beberapa karakteristik umkm, sehingga dengan memahami karakteristik tersebut maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Berikut beberapa karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun pemasaran pasar.
- b. Banyak berlokasi di pedesaan maupun kota-kota kecil
- c. Tidak ada pembagian tugas antara bidang administrasi dan produksi. Kebanyakan umkm dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik usaha sekaligus sebagai pengelola perusahaan dan juga memanfaatkan orang terdekat untuk menjadi tenaga kerjanya.
- d. Rendahnya akses industry kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, saudara.
- e. Sebagian besar umkm ditandai dengan belum dimilikinya perizinan usaha.¹⁰⁹

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 198, umkm adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu

¹⁰⁹ Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan...* hlm. 190

dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.¹¹⁰

2. Strategi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan juga usaha mikro kecil dan menengah. Sebagaimana dijelaskan pada penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 perlu dilakukan mengingat bahwa di dalam Renstra memuat tentang arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tulungagung untuk lima tahun mendatang. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam setiap tahunnya.

¹¹⁰ Suharjono, *Manajemen Pekreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 136.

Dalam upaya memberdayakan perekonomian para pelaku usaha mikro di Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan beberapa strategi untuk menunjang pengembangan usaha mikro dan juga untuk memberdayakan usaha mikro di Kabupaten Tulungagung

Strategi adalah sebuah rencana untuk memperbesar suatu pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang sudah didasari pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi serta pemasaran.¹¹¹

Menurut Jain:

*Setiap organisasi membutuhkan yang namanya strategi untuk menghadapi suatu permasalahan diantaranya adalah, sumber daya yang dimiliki nya sangat terbatas, adanya ketidakpastian mengenai kekuatan untuk bersaing dengan organisasi lain, kurangnya komitmen dan kepercayaan, keputusan harus di setujui oleh pihak-pihak terkait.*¹¹²

Berikut penjelasan mengenai posisi strategi menurut Sedamayanti pada buku yang berjudul Manajemen Strategi:

Strategi sebagai pencipta posisi unik dan berharga yang di dapatkan dengan melakukan beberapa aktifitas. Disini terdapat tiga basis posisi strategi yaitu:

a. Basis pertama

Didapatkan dengan memproduksi bagian kecil sebuah produk dari industry tertentu, karena posisi ini berasal dari pemilihan produk.

b. Basis kedua

¹¹¹ Hasan Alwi, DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹² Fandy Tjiptono, dkk, *Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), hlm. 5.

Melayani seluruh maupun sebagian kebutuhan konsumen tertentu.

c. Basis ketiga

Di dapat dari menarget konsumen yang didapat dari cara akses yang berbeda.¹¹³

Selain ada penjelasan posisi strategi, berikut juga ada tingkatan strategi. Berikut penjelasan mengenai tingkatan strategi:

Di dalam manajemen strategi, pada umumnya perusahaan atau badan usaha memiliki tiga level atau tingkatan strategi, diantaranya yaitu:

4) Strategi tingkat bidang satuan bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini pada umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.

5) Strategi tingkat korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Strategi ini dirumuskan dan ditetapkan oleh kelompok orang yang

¹¹³Sedamayanti, *Manajemen Strategi*, Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.13

menduduki jabatan manajemen puncak yang mencakup semua kegiatan organisasi, termasuk beraneka bidang bersifat bisnis yang ditangani dan semua kegiatan yang bersifat fungsional. Bahkan termasuk strategi interaksi dengan lingkungan eksternal. Intinya terletak pada definisi yang mengatakan bahwa strategi merupakan keputusan mendasar tentang dalam bidang apa organisasi bergerak sekarang dan di masa yang akan datang. Berdasarkan jangka waktu, strategi korporasi memiliki kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan strategi yang lain.¹¹⁴

6) Strategi tingkat fungsional

Strategi fungsional memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan tingkatan yang lain. Strategi ini berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), fungsi keuangan, fungsi riset. Strategi fungsional ini harus terus mengarah kepada strategi bisnis, sementara untuk konsep mereka yang paling utama adalah sesuai dengan metode dan cara penerapannya.

Dalam mewujudkan upaya tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan Pelatihan

Pelatihan adalah sebuah strategi yang telah di adakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung. Hal ini

¹¹⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 21

dilakukan untuk menunjang dan juga mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Tulungagung.

Disini Abdorrahman Ginting memberikan teori mengenai pelatihan bahwa yang dimaksud pelatihan tersebut adalah:

Sebuah proses belajar untuk memberikan sebuah keterampilan, pengetahuan dan juga pengalaman untuk mempersiapkan agar seseorang mampu melakukan pekerjaan yang tengah menjadi tanggung jawabnya atau yang akan menjadi tanggung jawabnya kelak ketika sudah bekerja.¹¹⁵

Pernyataan diatas diperkuat lagi oleh teori dari buku yang disusun oleh Harimurti Subanar yang berjudul Manajemen Usaha Kecil, pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Melalui sebuah pelatihan, setiap pelaku usaha diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep sebuah kewirausahaan, dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan juga wawasan yang lebih menyeluruh dan lebih aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.¹¹⁶

Setelah diadakan pelatihan tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berharap bahwa setelah mengikuti pelatihan para pelaku usaha mikro menjadi lebih terbuka dalam pengembangan usaha yang dijalankannya sehingga dengan demikian dapat membawa dampak baik sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Marliani yang menyatakan:

¹¹⁵ Gintings, Abdorrahman. *Esensi Praktis Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 124-130.

¹¹⁶ Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, Edisi Pertama Cetakan Kelima, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm.44-45

Pelatihan melalui diklat dalam sebuah upaya perlindungan kepada UMKM supaya dapat bersaing dan berkembang dengan pemberian modal supaya dapat mengatur dan juga membina koperasi yang baik dan unggul.¹¹⁷

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini bermacam-macam, ada pelatihan sektor makanan dan minuman, pelatihan pembuatan buku keuangan, pelatihan mengenai pembuatan PIRT dan masih banyak pelatihan yang lain lagi. Hanya saja dalam pelaksanaan pelatihan ini tidak bisa melibatkan seluruh binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, karena rata-rata umkm hanya bersedia mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan usaha yang dimilikinya, walaupun dalam setiap pelatihan Dinas Koperasi Usaha Mikro Tulungagung memberikan informasi terkait jadwal pelatihan yang akan diadakan sesuai tema yang sudah ditentukan pada masing-masing umkm dan mereka berhak mengikuti pelatihan tersebut.

Dari hasil pemaparan diatas peneliti membandingkan hasil temuan diatas dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feni Dwi Anggraeni dkk, yang menyatakan:

Dalam hal ini peran Dinas Koperasi dan Ukm Kota Malang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengembangan ukm. Dinas Koperasi dan Ukm Kota Malang juga mengadakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan ukm nya, kegiatan disini dapat berupa pengembangan produksi dan juga pengolahan, pemasaran produk dan juga yang lain¹¹⁸.

¹¹⁷ Fitri Maliani, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. 2015. hlm. 67.

¹¹⁸ Feni Dwi Anggraeni dkk, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Intenal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)*, Vol, 1, No, 6, September 2017, hlm. 1288-1289

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis atau yang biasa disebut dengan BIMTEK merupakan salah satu strategi yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan usaha mikro di Tulungagung. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sebenarnya hampir sama dengan pelaksanaan pelatihan, hanya saja untuk pelaksanaan bimtek lebih difokuskan kepada teknis usaha yang dijalankan, sehingga pada pelaksanaannya bisa diikuti oleh seluruh umkm tanpa melihat jenis usaha yang dijalankan.

3. Pemasaran Online

Pemasaran merupakan proses sosial serta manajerial yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan melalui penciptaan sebuah produk, pertukaran produk dan nilai produk. Pemasaran ditujukan untuk meningkatkan penjualan dalam sebuah usaha. Dengan strategi pemasaran yang baik maka produk akan mudah dikenal oleh masyarakat dan berimbas pada penjualan produk tersebut.¹¹⁹

Di zaman serba teknologi ini, pemasaran secara langsung seperti melalui pamflet, koran, majalah memang memiliki kelebihan tersendiri, hanya saja para pengusaha di masa ini meningkatkan inovasi dalam pemasaran produk dengan menggunakan media online.

¹¹⁹ Suyanto, *Analisis dan Desain Aplikasi multi media untuk pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 1.

Penggunaan media online memiliki kelebihan serta kemudahan dibandingkan dengan penggunaan media lainnya. Pemanfaatan media online dalam pemasaran dinilai cukup mudah, efektif, tidak membutuhkan biaya yang banyak serta mempercepat produk dikenal di masyarakat baik lokal maupun luar daerah bahkan bisa sampai luar negeri.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung juga memanfaatkan media online sebagai strategi dalam mengembangkan usaha mikro di Tulungagung. Penyuluhan akan mekanisme pemasaran melalui media online ini diberikan kepada usaha mikro untuk meningkatkan penjualan produk di umkm. Terlebih pada masa pandemi ini media online menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan oleh para pengusaha dari usaha rumahan hingga perusahaan besar.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Regalva, yang menyatakan:

*Sosial media sangat lah penting untuk kita, selain untuk komunikasi sosial media juga sangat bermanfaat untuk memasarkan sebuah produk secara online. Pemasaran online ini dapat dilakukan di media sosial facebook, instagram maupun whatsapp. Dengan adanya media sosial ini diharapkan dapat membawa kemajuan umkm karena, dengan adanya pemasaran seperti ini sangat lah mempermudah dalam proses penjual dan permintaannya juga pasti lebih banyak daripada pemasaran di toko seperti biasanya.*¹²⁰

4. Galery Pemasaran di PLUT KUMKM

¹²⁰ Muhamad Regalva Margiono, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Marketing Online Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwang*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 10

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Tulungagung oleh Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah berdiri di bangunan gedung yang terletak di Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang bersebelahan dengan pasar Ngantru , diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga hari jumat tanggal 9 Desember 2016 didampingi bapak Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, dari sinilah orang Tulungagung diharapkan bisa membuat dan memproduksi barang-barang produk ekonomi yang bisa laku dipasar local, nasional, maupun internasional.

Dengan adanya Galery PLUT-KUMKM ini adalah sebagai wadah atau sebagai tempat pertemuan ketika Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan suatu acara Bimtek maupun pelatihan. Selain itu fungsi dari adanya Galery PLUT-KUMKM ini adalah sebagai wadah pemasaran produk dari para pelaku usaha mikro Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya Galery ini diharapkan dapat memamerkan hasil produksi para pelaku umkm di Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam meningkatkan kualitas produk melalui bidang produksi, kemudian dalam meningkatkan kualitas produk tentunya membutuhkan modal lebih guna untuk membuat produk baru atau menginovasi produk melalui bidang pembiayaan, ketika sudah memiliki modal maka perlu adanya pembinaan atau pelatihan melalui bidang SDM, dan ketika produk sudah memiliki kualitas yang baik maka dapat melakukan perizinan usaha atau PIRT

melalui bidang kelembagaan yang ada di PLUT KUMKM. Setelah memiliki PIRT maka produk tersebut dapat dipasarkan melalui bidang pemasaran yang ada di PLUT KUMKM. Sedangkan untuk mengikuti pameran baik di kota maupun luar kota yang di bina oleh ketua gallery maka produk tersebut dapat dikatakan layak atau memiliki kualitas yang baik melalui binaan di PLUT KUMKM.

3. Faktor yang menjadi penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19

Dalam mencapai suatu tujuan terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi. Dari adanya beberapa hambatan tersebut dapat memperkuat pengorganisasian untuk bersatu dalam memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan perekonomian mengalami beberapa hambatan.

Hambatan internal berasal dari dalam diri pelaku usaha yang meliputi kurangnya dorongan dari orang terdekat, kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan, sehingga jika diajak maju untuk mengembangkan usaha nya akan sulit untuk menerima masukan tersebut.¹²¹ Sedangkan hambatan eksternal nya berasal dari aspek peranan dinas terkait untuk

¹²¹ Andita Tisa Dan Krisna Angga Dwita, *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap minat berwirausaha Pada Woman Entrepeneur Pemilik Usaha Dikota Bandung*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2018, hlm. 1856.

mengupayakan hal yang terbaik sehingga berjalannya kegiatan produksi tertata dengan semestinya.

Secara garis besar, hambatan yang di hadapi UMKM dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi usaha dengan pendapatan kurang dari 300 juta per tahun umumnya hambatan yang dihadapi adalah bagaimana cara menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka para pelaku usaha, umumnya asal dapat berjualan dengan (aman) sudah cukup. Mereka tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi berikutnya.
- b. Bagi usaha yang pendapatannya antara 300 juta hingga 2,5 miliar per tahunnya, hambatan yang di hadapi jauh lebih kompleks. Umumnya para pelaku usaha mulai memikirkan untuk melakukan sebuah ekspansi usaha lebih lanjut. Berikut beberapa prioritas hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jenis ini adalah sebagai berikut:
 - a) Masalah belum adanya system administrasi keuangan manajemen yang baik.
 - b) Masalah mengenai penyusunan proposal untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun dari modal ventura, karena kebanyakan umkm merasa kesulitan ketika ingin mengajukan pinjaman.

- c) Masalah pembuangan limbah yang mana limbah berasal dari produksi dan juga yang bisa mencemari lingkungan sekitar apabila proses produksi tidak sesuai dengan proses yang benar.
- d) Masalah mengenai penyusunan perencanaan bisnis karena persaingan dalam perebutan pasar.
- e) Masalah memperoleh bahan baku.
- f) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.¹²²

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kemauan para pelaku usaha mikro untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan tujuan supaya dengan diadakannya pelatihan ini dapat membawa perubahan kebaikan kepada pelaku usaha dan juga pada usaha yang dijalankannya. Kurangnya dorongan dari orang terdekat maupun kurangnya pengetahuan dan juga pengalaman juga dapat menghambat jalannya usaha tersebut. Selain itu minimnya modal dan juga sarana untuk fasilitas produksi bahkan langka nya bahan baku sangat menjadi penghambat yang utama. Mungkin untuk pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bisa membantu dengan baik bahkan untuk pinjaman modal untuk produksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bisa membantu. Tetapi jika hambatannya ada pada bahan baku yang bisa mengatasi hal tersebut tetap pelaku usaha sendiri. Tetapi jika hambatan yang lain pihak dari

¹²² Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan...* hlm. 196

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih bisa mengusahakan supaya usaha yang dijalankan tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar.

4. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung, untuk menghadapi hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19

Agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar maka semua pihak yang mempunyai hubungan dan saling bekerja sama sesuai dengan arahan dan juga himbauan agar suatu tujuan dapat tercapai maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagaimana keinginan dan juga tujuannya adalah ingin mengembangkan dan juga memberdayakan perekonomian usaha mikro di Kabupaten Tulungagung ini.

Dalam upaya menghadapi hambatan yang terjadi dalam pengembangan usaha mikro di Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara internal, pihak dinas hanya mampu memberikan motivasi serta kemudahan berbagi informasi kepada para pengusaha agar memiliki pengetahuan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, untuk selebihnya pihak pelaku usahalah yang memberikan motivasi penuh pada diri sendiri. Sedangkan dalam hambatan pelaksanaan pelatihan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung masih belum bisa untuk mengadakan pelatihan yang sesuai dengan permintaan semua pelaku usaha mikro. Hal ini dikarenakan pihak dinas telah menetapkan jadwal pelatihan dengan tema yang sudah direncanakan dalam periode

tertentu. Sehingga untuk permintaan dari setiap pelaku usaha mikro terkait kesesuaian tema yang dijalankan dalam pelatihan masih belum bisa terpenuhi.

Selain itu, pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UMKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
- b. Bantuan permodalan
- c. Perlindungan usaha
- d. Pengembangan kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Membentuk lembaga khusus
- g. Memantapkan asosiasi
- h. Mengembangkan promosi
- i. Mengembangkan kerjasama yang setara.¹²³

Pengembangan UMKM itu perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepannya perlu di upayakan lebih kondusif lagi. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan

¹²³ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 121.

umkm, dan juga selain itu mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya.

Berdasarkan pasal 16 UU No. 2 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memfasilitasi usaha dalam bidang:

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber daya manusia
- d. Desain dan teknologi.

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan teknis produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bagi produk UMKM
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan usaha menengah.¹²⁴

¹²⁴ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan: Teori, Praktek dan Kasus-kasus...* hlm. 15

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah startegis guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar tidak hanya menjadi pelaku di dalam negeri sendiri namun dapat pula melangkah maju pada tingkat regional.

Peran pemerintah tntu sangat penting dalam mengayomi dan melindungi komunitas bisnis. Pemerintah perlu membuat payung hukum yang tidak membatasi ruang gerak dan mengintimidasi komunitas bisnis yang orangnya merupakan pelaku usaha sendiri.¹²⁵

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dengan memaksimalkan fasilitas terkait pengembangan usaha mikro di Tulungagung sesuai dengan strategi yang dilaksanakan, seperti :

1. Pemaksimalan fasilitas pada pelaksanaan pelatihan.
2. Pengadaan Bimbingan Teknis dan *workshop*
3. Memberikan fasilitas untuk mengembangkan produk ukm.
4. Pendirian Galery pemasaran hasil produk ukm.

Akan tetapi selama masa pandemi covid 19 ini pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya bisa memanfaatkan teknologi internet untuk memudahkan pelaku usaha mikro untuk berkonsultasi mengenai usaha yang dijalankan.

¹²⁵ Subarsono, *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon*, Jurnal Ekonomi, Vol. 5 No. 2 (Desember 2016), hlm. 2302-2308.